

MODEL EVALUASI *CONTEXT, INPUT, PROCESS* DAN *PRODUCT*: HAKIKAT DAN PENERAPANNYA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

YOSEPH PEDHU*

Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstrak

Evaluasi merupakan komponen pokok dalam bimbingan dan konseling. Evaluasi dilakukan untuk menilai keefektifan dan dampak dari pelaksanaan bimbingan dan konseling dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keberlanjutan program yakni dilanjutkan, dikembangkan, atau dihentikan. Pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling membutuhkan sebuah model. Artikel ini berupaya untuk mengkaji model evaluasi *context, input, process*, dan *product* (CIPP) yang dapat diterapkan dalam bimbingan dan konseling. Penulis menelaah hakikat, komponen-komponen evaluasi, dan penerapannya dalam bimbingan dan konseling. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang evaluasi program dan penerapan model CIPP juga dibahas.

Kata-kata kunci: Evaluasi, program bimbingan dan konseling, model CIPP

Abstract

Evaluation is a key component in guidance and counseling. Evaluation is carried out to assess the effectiveness and impact of the implementation of guidance and counseling and the results are used to make decisions regarding the sustainability of the program, namely to continue, develop, or discontinue. Implementation of the evaluation of the guidance and counseling program requires a model. This article seeks to examine the context, input, process, and product (CIPP) evaluation model that can be applied in guidance and counseling. The author examines the nature, components, and its application in guidance and counseling. Previous studies on program evaluation and application of the CIPP model are also discussed.

Key words: Evaluation, guidance and counseling program, CIPP model

*Penulis Korespondensi.

Email: yoseph.pedhu@atmajaya.ac.id*

PENDAHULUAN

Salah satu tugas guru bimbingan dan konseling adalah melakukan evaluasi terhadap program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 8 ayat 4 khususnya secara tegas menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling harus dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Guru BK dan konselor sekolah wajib merencanakan, merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling.

Evaluasi dipahami sebagai proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang keefektifan atau dampak dari pelaksanaan BK terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik (Cobia & Henderson, 2007; Gibson & Mitchel, 2011). Menurut Gibson dan Mitchell (2011) evaluasi program BK harus dilakukan secara konstan. Mengabaikan atau menghindari evaluasi berarti menunjukkan bahwa program BK memiliki kelemahan dan berpotensi gagal, karena keberhasilan atau

kegagalan sebuah program hanya dapat diketahui melalui evaluasi dampak pelaksanaan program tersebut. Sudjana (2008) menekankan bahwa kemajuan suatu organisasi dan kegiatan-kegiatannya serta keefisienan dan keefektifan program dipengaruhi oleh fungsi dan hasil evaluasi program. Keberhasilan atau kegagalan suatu program tidak dapat diketahui tanpa adanya kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Para penyelenggara dan pengelola instansi dan organisasi profesional perlu memperhitungkan serta memperhatikan masukan hasil evaluasi dalam menentukan atau mengambil keputusan yang akurat dan bermakna (Shertzer & Stone dalam Sugiyo, 2014).

Evaluasi program bimbingan dan konseling dilakukan untuk menunjukkan praktik akuntabilitas guru bimbingan dan konseling dan konselor sekolah (Gysbers & Henderson, 2012) serta penyempurnaan dan peningkatan profesionalitas program bimbingan dan konseling (Gibson & Mitchell, 2011). Evaluasi program BK dilakukan baik terhadap seluruh komponen atau sebagian unsur program. Gysbers dan Henderson (2012) bahkan menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara komprehensif terhadap semua komponen yakni evaluasi kinerja

konselor, evaluasi program, evaluasi hasil, dan evaluasi intervensi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan dampak pelaksanaan program terhadap siswa yang mendapatkan layanan BK. Evaluasi program dapat digunakan sebagai prosedur penelitian diri untuk mengetahui bagaimana program saat ini berfungsi sebelum melakukan perbaikan. Evaluasi hasil merupakan proses yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa dampak atau kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap kesuksesan para siswa. Evaluasi intervensi berfokus pada upaya mengevaluasi intervensi bimbingan dan konseling yang digunakan yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan yang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Kajian literatur menekankan evaluasi sebagai komponen utama yang harus dilakukan untuk menilai keefektifan dan dampak dari pelaksanaan program BK bagi perkembangan hidup peserta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak guru BK dan konselor sekolah belum melakukannya secara berkala dan menyeluruh. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan guru BK belum melakukan evaluasi: (1) guru bimbingan dan konseling tidak memiliki cukup waktu melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling. (2) Faktor kelelahan karena adanya

kegiatan tambahan yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling seperti mengajar mata pelajaran, melakukan konseling dengan orangtua; perbandingan rasio guru dan murid yang tidak seimbang merupakan faktor penghambat bagi guru bimbingan dan konseling untuk melakukan evaluasi. (3) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan evaluasi program. Guru bimbingan dan konseling sering mengalami kebingungan terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana mengevaluasinya. Dengan kata lain, guru bimbingan dan konseling merasa kurang kompeten dalam melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling. (4) Ketakutan sebagian guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi karena berkaitan dengan evaluasi kinerja mereka. Padahal hakikat evaluasi program yang dimaksud bukan untuk menyulitkan para guru bimbingan dan konseling, tetapi untuk mewujudkan pelayanan yang profesional karena harkat dan martabat profesi konselor ditentukan oleh kualitas layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas. (5) Guru bimbingan dan konseling mengalami kebingungan dalam melakukan evaluasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya model yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. (6) Kurangnya pemahaman guru bimbingan dan konseling

terhadap komponen program bimbingan dan konseling komprehensif. Evaluasi dipahami hanya sebatas pada evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan program kepada siswa, sehingga fokus evaluasi yang dilakukan secara insidental dan terbatas kepada siswa. Edwards (2009) melakukan penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi guru BK dan konselor sekolah belum melakukan evaluasi BK secara berkala. Faktor-faktor itu adalah adanya kekhawatiran dari konsekuensi negatif dari evaluasi, kurangnya pelatihan, kurangnya finansial dan sumber daya manusia, kendala waktu, tidak memahami kriteria pengukuran, belum adanya model atau panduan, belum adanya instrumen penilaian, dan munculnya anggapan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang berat dan sulit. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagai bagian penting dalam manajemen BK belum optimal.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi program BK yang efektif membutuhkan sebuah model. Model berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, merancang, dan melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berkaitan dengan evaluasi BK, model berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengembangkan keseluruhan kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi program BK.

Para ahli evaluasi menawarkan banyak model evaluasi untuk mengevaluasi sebuah program. Kajian literatur mengenai evaluasi menunjukkan adanya berbagai model evaluasi dengan menggunakan istilah yang berbeda sesuai nama pengembang atau tahap-tahap evaluasinya, namun memiliki tujuan yang sama yakni kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menentukan tindak lanjut suatu program (Arikunto dan Jabar (2014). Ada banyak model yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program, beberapa di antaranya adalah evaluasi model Provus, evaluasi model Stake, evaluasi model Kirkpatrick, evaluasi model *context, input, process, dan product* (CIPP). Artikel ini menelaah model evaluasi CIPP dan kontribusinya dalam BK. Model ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam pengembangan dan penerapan keilmuan BK baik dalam ranah teori maupun dalam praksis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui buku dan jurnal (Zed, 2008; Mahmud, 2011; Sari & Asmendri, 2020). Pencarian informasi berkaitan dengan kajian literatur maupun penelitian empiris mengenai model evaluasi

berbasis CIPP dan evaluasi program BK dilakukan berdasarkan sumber *database Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Microsoft Academic*, dan Portal Garuda Publikasi Indonesia Index (IPI) dengan menggunakan kata kunci evaluasi program BK dan model evaluasi CIPP.

PEMBAHASAN

Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (2003) berdasarkan pandangan bahwa evaluasi dilakukan bukan untuk membuktikan, tetapi untuk meningkatkan. Model ini memberikan panduan untuk mengevaluasi proyek atau program ditinjau dari aspek *context, input, process*, dan *product* (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014).

Fitzpatrick, Sanders dan Worthen (2004) mengklasifikasi model CIPP sebagai model evaluasi yang berbasis manajemen. Pengklasifikasian ini didasarkan pada pemikiran bahwa informasi evaluasi merupakan bagian penting membuat keputusan yang baik dan evaluator adalah sangat efektif dalam melayani administrator, manajer, pembuat kebijakan, dewan pengurus, praktisi, dan yang lainnya yang membutuhkan informasi evaluasi yang baik (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2004). Model CIPP sebagai model yang berorientasi manajemen

merupakan pendekatan yang menginkorporasikan empat komponen yang berbeda ke dalam satu kesatuan kerangka kerja untuk membantu para manajer dan pembuat keputusan dengan lebih baik (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2004).

Kerangka kerja model CIPP membantu para evaluator untuk mengatasi empat keputusan yaitu (1) evaluasi *context* untuk membantu membuat keputusan perencanaan, (2) evaluasi *input* untuk membantu keputusan menyusun atau merancang, (3) evaluasi *process* untuk membantu keputusan mengimplementasikan, dan (4) evaluasi *product* untuk membantu keputusan mendaur ulang (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2004). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang relevan dengan kebutuhan pola evaluasi pelayanan apapun, termasuk BK di sekolah (Sugiyo, 2014).

Context Evaluation (Evaluasi Konteks).

Evaluasi *context* dilakukan untuk memetakan kebutuhan, persoalan, aset, dan berbagai peluang dalam lingkungan evaluasi yang dituju (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014). Dalam BK, evaluasi *context* meliputi penilaian hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik yang meliputi bidang belajar, pribadi, sosial, karir, dan kehidupan beragama; permasalahan-

permasalahan peserta didik yang meliputi bidang belajar, pribadi, sosial, karir, dan kehidupan beragama; visi, misi, dan tujuan sekolah; visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan program BK; serta peluang-peluang yang mendukung penyelenggaraan program BK di sekolah.

Evaluasi konteks dapat dilakukan sebelum, selama, maupun setelah proyek, program atau intervensi lainnya. Evaluasi sebelum proyek atau program dilakukan sebagai upaya untuk membantu menetapkan tujuan atau prioritas. Dalam kasus selama atau setelah program dijalankan, institusi melakukan dan melaporkan evaluasi konteks dalam kombinasi dengan evaluasi masukan, proses, dan produk (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014).

Input Evaluation (Evaluasi Masukan).

Orientasi evaluasi masukan ialah membantu menentukan pendekatan program atau tindakan agar dapat membuat perubahan yang diinginkan. Evaluator mengkaji pendekatan-pendekatan yang berpotensi, termasuk pendekatan atau tindakan yang sudah digunakan (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014). Evaluator harus menelaahnya melalui lingkungan klien hal-hal yang berkaitan dengan hambatan politik, kendala keuangan maupun kendala hukum klien, dan sumber-sumber potensial lainnya yang

tersedia. Tujuan keseluruhan evaluasi masukan adalah membantu pengambil keputusan menilai strategi-strategi program alternatif untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan yang dievaluasi, menyusun dengan tepat anggaran dan rencana program yang dapat dilakukan, dan mengembangkan catatan akuntabilitas untuk mempertahankan prosedur program dan rencana-rencana sumber daya (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014). Secara singkat evaluasi masukan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencari tahu kemampuan atau daya dukung sistem, alternatif strategi program, desain prosedur implementasi program, pengelolaan anggaran dan penjadwalan program (Widoyoko, 2015; Sugiyo, 2014). Dalam BK, evaluasi *input* meliputi kegiatan penggambaran input program BK. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah strategi dan sumber-sumber program BK yang tersedia yang mendukung pelaksanaan program BK. Pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi input adalah apakah sekolah menyediakan sumber-sumber program dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan program BK? Evaluasi input dilakukan untuk menelaah kapabilitas sistem, alternatif strategi program.

Process Evaluation (Evaluasi Proses).

Evaluasi proses meliputi penelaahan terhadap pelaksanaan serta dokumentasi proses. Tujuan

evaluasi proses adalah (1) memberikan umpan balik kepada staf dan manajer tentang sejauh mana mereka melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai waktu, sebagaimana direncanakan, dan efisien. (2) Membimbing staf untuk mengubah dan meningkatkan rencana prosedur dan anggaran secara tepat. Biasanya staf tidak dapat menentukan semua aspek rencana ketika sebuah program dimulai. Staf harus mengubah rencana-rencana apabila beberapa keputusan awal tidak tepat. (3) Mengkaji sejauh mana partisipan menerima dan mampu melakukan tugas mereka (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014).

Stufflebeam dan Shinkfield (dalam Zhang et al, 2011) memaparkan bahwa evaluasi proses berguna untuk memantau proses pelaksanaan proyek/program. Evaluasi proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada upaya untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Stufflebeam (dalam Arikunto dan Jabar, 2014) mengusulkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan evaluasi proses: (1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? (2) Apakah staf yang terlibat di dalam

pelaksanaan program akan mampu menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan? (3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? (4) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan? Dalam BK, evaluasi proses mencakup kegiatan menganalisis bagaimana sebuah program BK yang sedang diimplementasikan, memonitoring bagaimana program BK bekerja, mengaudit program BK untuk menjamin bahwa program tersebut mengikuti pedoman hukum dan etis, mengidentifikasi kecacatan dalam rancangan prosedur atau dalam implementasi program.

Product Evaluation (Evaluasi Produk).

Evaluasi produk merupakan tahap terakhir evaluasi dalam model CIPP. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur, menginterpretasi, dan menilai hasil suatu program. Evaluasi hasil dilakukan untuk menjawab pertanyaan “Apakah program ini berhasil?” (Stufflebeam, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014). Dalam BK, evaluasi *product* meliputi kegiatan menentukan dan mengkaji hasil-hasil umum dan khusus dari program BK, mengukur hasil yang diantisipasi, menilai merit atau kelayakan program BK, mengevaluasi manfaat restrospektif atau asesmen biaya.

Kelebihan dan kekurangan model evaluasi

CIPP. Fitzpatrick, Sanders dan Worthen (2004; dalam Sugiyo, 2014) memandang bahwa model CIPP memiliki empat potensi kekuatan: (1) Proses evaluasi lebih terfokus. Model evaluasi CIPP memungkinkan evaluator dapat mengumpulkan informasi yang terarah pada suatu tahapan evaluasi. Data atau informasi dapat diklasifikasi secara menyeluruh sebagai konteks, input, proses, atau produk. (2) Penerapan evaluasi model CIPP memungkinkan evaluasi tidak harus dilakukan setelah satu siklus manajemen selesai, tetapi dapat dilakukan ketika proses manajemen masih berjalan yang dapat memungkinkan evaluator dapat mengambil keputusan yang cepat dalam perbaikan. (3) Model evaluasi CIPP sangat bermanfaat bagi evaluator untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penting dalam evaluasi. (4) Model evaluasi CIPP memberikan informasi yang berkala mengenai semua komponen dari suatu sistem.

Model CIPP juga memiliki keterbatasan antara lain bahwa penerapan model ini terutama dalam bidang program pembelajaran di kelas memiliki tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi apabila tidak dilakukan beberapa modifikasi. Hal ini dapat terjadi karena untuk mengetahui konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas akan

melibatkan banyak pihak yang membutuhkan waktu, biaya dan sumber daya lainnya.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan

model CIPP. Beberapa penelitian mengenai penerapan model CIPP dalam BK sudah dilakukan dengan hasil yang cukup memuaskan. Putra dan Nusantoro (2015) melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Blora ditinjau dari evaluasi model CIPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum evaluasi pelaksanaan program BK di SMK Negeri 1 Blora dengan dengan model evaluasi CIPP berada pada kategori cukup baik. Sudibyo, Sugiyo, dan Supriyo (2013) juga melakukan penelitian tentang model evaluasi layanan informasi bimbingan dan konseling berbasis CIPP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru BK sangat membutuhkan panduan evaluasi layanan informasi BK berbasis CIPP.

Beberapa penelitian lain berkaitan dengan kebutuhan akan perlunya model evaluasi juga menunjukkan bahwa guru BK sangat membutuhkan panduan evaluasi dalam mengevaluasi program BK (Messina, 2005; Whiston & Aricak, 2008; Can, 2010; Clemens, Carey & Harrington, 2010; Clemens, Sipp & Kimbel, 2011; Kusmanto, Sugiharto, & Sugiyo, 2014). Messina (2005);

Can (2010); serta Clemens, Sipp & Kimber, 2010) secara khusus melakukan penelitian terkait pengembangan instrumen evaluasi kinerja konselor. Penelitian mengenai pengembangan instrumen komponen evaluasi program juga sudah dilakukan (Whiston & Aricak, 2008; Kusmanto, Sugiharto, & Sugiyo, 2014; Clemens, Carey, & Harrington, 2010; serta Sudiby, Sugiyo, & Supriyo, 2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konselor membutuhkan panduan evaluasi bimbingan dan konseling.

KESIMPULAN

Hakikat dan komponen evaluasi program berbasis CIPP telah dikaji. Evaluasi merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam BK. Evaluasi program BK merupakan proses yang sistematis dan terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi tentang keefektifan pelaksanaan program BK yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah program BK diteruskan, dikembangkan, atau dihentikan.

Evaluasi program yang efektif membutuhkan sebuah model. Model berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengembangkan keseluruhan kegiatan yang berkenaan dengan

evaluasi program BK. Ada banyak model yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program seperti evaluasi model Provus, evaluasi model Stake, evaluasi model Kirkpatrick, evaluasi model CIPP.

Model evaluasi CIPP dapat merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam mengevaluasi program BK. Komponen CIPP dapat dilihat baik sebagai bentuk evaluasi maupun sebagai langkah atau tahap dalam sebuah evaluasi komprehensif. Evaluasi *context* dalam BK meliputi penilaian hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik yang meliputi bidang belajar, pribadi, sosial, karir, dan kehidupan beragama; permasalahan-permasalahan peserta didik yang meliputi bidang belajar, pribadi, sosial, karir, dan kehidupan beragama; visi, misi, dan tujuan sekolah; visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan program BK; serta peluang-peluang yang mendukung penyelenggaraan program BK di sekolah. Evaluasi *input* dalam BK meliputi kegiatan penggambaran input program BK. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah strategi dan sumber-sumber program BK yang tersedia yang mendukung pelaksanaan program BK. Pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi input adalah apakah sekolah menyediakan sumber-sumber program dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan program BK? Evaluasi input dilakukan untuk menelaah kapabilitas sistem,

alternatif strategi program. Evaluasi proses dalam BK mencakup kegiatan menganalisis bagaimana sebuah program BK yang sedang diimplementasikan, memonitoring bagaimana program BK bekerja, mengaudit program BK untuk menjamin bahwa program tersebut mengikuti pedoman hukum dan etis, mengidentifikasi kecacatan dalam rancangan prosedur atau dalam implementasi program. Evaluasi *product* dalam BK meliputi kegiatan menentukan dan mengkaji hasil-hasil umum dan khusus dari program BK, mengukur hasil yang diantisipasi, menilai merit atau kelayakan program BK, mengevaluasi manfaat restrospektif atau asesmen biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Can, G. (2010). Development of the elementary school counselor self-efficacy scale. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. 9, 1158–1161.
- Clemens, E. V., Carey, J. C., & Harrington, K. M. (2010). The school counseling program implementation survey: Initial instrument development and exploratory factor analysis. *Professional School Counseling*. 14(1), 125-134.
- Clemens, E. V., Shipp, A., dan Kimbel, T. (2011). Investigating the psychometric properties of school counselor self-advocacy questionnaire. *Professional School Counseling*. 15(1), 34-44.
- Cobia, D. C., & Henderson, D. A. (2007). *Developing an effective and accountable school counseling program*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.

- Edwards, L. (2009). Accountability practices of school counselors. *Dissertation*. Auburn, Alabama: Auburn University.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.
- Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2011). *Bimbingan dan konseling*. Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gysbers, N. C. (2008). Evaluating school guidance and counseling programs: Past, present, and future dalam Coleman, H. L. K. & Yeh, C. (Eds.), *Handbook of School Counseling* New York, London: Routledge. pp. 739-749.
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2012). *Developing managing your shcool guidance and counseling program*. Alexandria, VA: ACA.
- Kusmanto, A. S., Sugiharto, D. Y. P., & Sugiyo. (2014). The development of evaluation program model guidance and counseling service based on CSE-UCLA of junior high school in Kudus. *Jurnal Bimbingan Konseling*. 3(1), 66-71.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Pustaka Setia: Bandung.
- Messina, A. C. (2005). The development of a counselor performance evaluation. *Thesis*. West Virginia: Marshall University Huntington.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Putra, E. M. & Nusantoro, E. (2015). Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Blora (Model CIPP). *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application (IJGC)*. 4(1), 37-45.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation dalam Kellaghan, T., Stufflebeam, D. L., & Wingate, L. A. (Eds.), *International Handbook of Educational Evaluation*. Dordrecht, The Netherlands; Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. pp. 30-62.
- Stufflebeam, D. L & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models and applications*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

- Sudibyo, H., Sugiyo, & Supriyo (2013). Model evaluasi layanan informasi bimbingan dan konseling berbasis context input process product (CIPP)". *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application (IJGC)*. 2(1), 57-63.
- Sudjana, D. 2008. *Evaluasi program pendidikan luar sekolah untuk pendidikan nonformal dan pengembangan sumber daya manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyo. (2014). *Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah: Pedoman teoritis dan praktis bagi konselor sekolah*. Semarang: Widya Karya.
- Widoyoko, S. E. P. (2015). *Evaluasi program pembelajaran: Panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zhang, G. et al . (2011). Using the context, input, process, and product evaluation model (CIPP) as a comprehensive framework to guide the planning, implementation, and assessment of service-learning programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*. 15(4), 57-84.